

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR
11 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) PT. PERMODALAN SIAK DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2007-2012**

Oleh:

Mukholis Umair

Email : *u.mukholis@yahoo.co.id*

Pembimbing : Drs. H. Ishak M.Si

Bibliografi : 14 buku

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru Panam Pekanbaru
28293 – Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation of Siak Regency Regulation No. 11 Year 2006 on the Establishment of provincial enterprises (enterprises) PT. In the capital Siak Economic Empowerment In Siak seen in the implementation. The usefulness of this study are as material information regarding the implementation of the People's Empowerment held by PT. Siak starting capital to grow, develop and nurture, so as to provide input to the PT. Siak capital and provincial governments to the realization of equitable empowerment of the people.

This study uses the theory proposed by (Riant Nugroho, 2006: 158) the implementation of the policy in principle is a way in order to achieve a policy goal, nothing more and nothing less. To implement public policy, then there are two options available measures that directly mengineimplementasikan in the form of programs or policies regulai derivative or derivative of such public policy. The method used in this study is qualitative methods of data that can not be expressed in terms of numbers but in the form of an explanation that describes the shape of the state, a process, a particular event. Data collection techniques using interview techniques and documentation of the results of this study can be concluded that the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2006 is not running optimally. It can be seen from this type of loan can not reach the poor, not the course of 11 types of loans that are provided and the misappropriation of funds by customers.

Key Word : Implementation, PT. Permodalan Siak, Economic Empowerment.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Sektor ekonomi memiliki peranan penting di dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang telah menjadi tujuan Negara. Faktor ekonomi berperan langsung dalam aspek kesejahteraan, bagaimana hidup bisa sejahtera jika pendapatan tidak bisa menutupi kebutuhan. Majunya perekonomian yang ada di pusat tentunya dipengaruhi oleh maju tidaknya perekonomian yang ada di daerah. Majunya perekonomian yang ada di daerah tentunya juga harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mendukung hal tersebut.

Kebijakan Publik menurut (Thomas Dye dalam Subarsono 2005: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah mengahadi suatu masalah publik. Defenisi mengenai kebijakan menurut Thomas Dye mengandung makna (Subarsono 2005: 2) bahwa (1) kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Selanjutnya menurut (Raharjdo Adisasmita, 2011: 113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi-instansi

pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat yang perlu di tangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah, agar supaya tujuan berhasil dicapai secara efektif dan efesien.

Dalam rangka memajukan perekonomian yang ada di daerah serta mengisi agenda pembangunan yang ada di Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak. Pada Tanggal 12 Januari 2007 PT. Permodalan Siak didirikan. Maksud dan tujuan didirikannya PT. Permodalan Siak terdapat dalam BAB III Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 :

- 1) Maksud didirikannya PT. PERSI adalah untuk membina, menumbuhkan, mengembangkan dan memperdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan agenda pembangunan Kabupaten Siak.
- 2) Tujuan didirikan PT. PERSI adalah untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui Bantuan Permodalan, Jasa Manajemen, Jasa Pemasaran, Pendampingan

dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi sebagai perwujudan dari Agenda Pembangunan Kabupaten Siak.

Berdasarkan maksud dan tujuan didirikannya PT. Permodalan Siak maka target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah pemberdayaan ekonomi. Menurut (Rahardjo. A, 2011: 131) pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

Menurut (Harjanto dalam Jeffrey, 2013: 6) bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti memberi daya, memberi “*power*” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Menurut (A. Usmara dalam Istiqomah, 2013: 14) pemberdayaan adalah salah satu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan memberi tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah.

Salah satu upaya pemberdayaan menurut (Kartasmita

dalam Istiqomah, 2013: 16) adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, artinya pada saat memberikan pemberdayaan diwujudkan melalui langkah-langkah yang nyata seperti pendidikan atau pelatihan, kesehatan, modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar serta sarana dan prasarana lainnya. Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, bertanggung jawab, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan perumahan,

pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Menurut (Euis Amalia 2009: 2) Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Memaksimalkan diri untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan politik.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan di bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu kegiatan guna meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan produktivitas berupa bantuan modal usaha. Kebijakan dibidang pemberdayaan ekonomi di anggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun

senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dibidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

PT. Permodalan Siak dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebagai perpanjangan tangan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, khususnya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan ekonomi. PT. Permodalan Siak bergerak di bidang penyediaan jasa permodalan. Menurut (Mulyadi 2006: 194) ada tiga faktor dalam pembangunan ekonomi, ketiga faktor tersebut, yaitu: tanah, pekerja, dan modal. Modal merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi, semua produktivitas dalam ekonomi tentunya membutuhkan modal, baik itu dalam perdagangan dan industri.

PT. Permodalan Siak merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang keberadaan sangat penting di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Siak yang kekurangan dana dan tidak memiliki daya dalam usaha perekonomian. Berdasarkan konsep Peraturan Daerah yang menjadi pondasi berdirinya PT. Permodalan Siak. PT. Permodalan Siak mempunyai beban yang berat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat karena pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan perekonomian diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu di

pertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk.

PT. Permodalan Siak adalah sebuah Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui suatu kebijakan, berdasarkan teori-teori tentang kebijakan bahwa suatu kebijakan mengandung sebuah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui PT. Permodalan Siak adalah terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak. Dalam upaya peningkatan ekonomi di suatu lingkungan masyarakat, hal pertama yang dilakukan adalah memberikan daya kepada masyarakat kalangan bawah atau masyarakat miskin.

Pemaknaan tradisional dari kemiskinan adalah pendapatan yang rendah atau tidak berpendapatan. Pemaknaan tradisional ini tercermin dari defenisi yang digunakan oleh Bank Dunia yang menjadi ukuran US\$ 2 pendapatan perhari sebagai standar minimum garis kemiskinan. Selain itu, PBB mendefenisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi dimana individu-individu tidak memiliki pilihan dan kesempatan didalam mengembangkan kapabilitas hidupnya. Dengan kata lain kemiskinan merupakan sebuah kondisi penurunan kualitas hidup secara terus menerus.

Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi. Kekurangan materi adalah kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam

memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar. Diantara beberapa faktor penyebab kemiskinan di tengah masyarakat adalah tidak memiliki modal. Hadirnya PT. Permodalan Siak sangat sinkron dengan masalah kekurangan atau tidak memiliki modal yang ada dalam masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya jasa permodalan yang disediakan oleh PT. Permodalan Siak tidak dapat disentuh oleh masyarakat miskin. Jasa permodalan ini hanya dapat disentuh oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah. Selain itu terjadi juga penyelewengan dana oleh nasabah yang menyebabkan rusaknya nilai yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006. Dana permodalan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan ekonomi tapi digunakan untuk kegiatan yang sifatnya lebih konsumtif.

Selanjutnya dari 11 produk kredit yang ada di PT. Permodalan Siak, hanya beberapa jenis kredit saja yang diminati oleh masyarakat. Dari pertama didirikan PT. Permodalan Siak tidak pernah melaksanakan pencairan kredit dengan pihak yang berbadan usaha, koperasi, atau kelompok, padahal sudah tersedia produk kredit untuk pihak-pihak yang berbadan usaha. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbadan usaha sangat besar dampaknya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, salah satu efek yang ditimbulkannya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.

METODE

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini

menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Data-data yang didapatkan berupa data hasil wawancara kepada staff dan pegawai PT. Permodalan Siak yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah karena pelaksana tersebut merupakan objek utama Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 di Kabupaten Siak. Selain dari hasil wawancara juga digunakan dokumentasi yang diambil dari beberapa media online serta juga dilakukan dengan observasi atau pengamatan lapangan langsung.

Dalam menganalisa data Kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitan terhadap-orang-orang bisa dalam situasi-situasi tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari metode penelitian kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung pada perkembangan data yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sasaran dalam penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarinya dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan

fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Siak Tahun 2007-2012

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Permodalan Siak. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak ini didirikan dengan tujuan memberdayakan ekonomi rakyat dalam rangka mengisi agenda pembangunan yang ada di Kabupaten Siak. Pembangunan dibidang ekonomi sangat berpengaruh pada kemajuan suatu daerah. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembagunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian.

Memberdayakan ekonomi rakyat merupakan salah satu langkah dalam mengerakkan pertumbuhan ekonomi. Jika masyarakat diberdayakan dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat baik itu berupa pendidikan

atau pelatihan, informasi, kesehatan, modal atau sarana dan prasarana yang dapat memberdayakan masyarakat, tindakan tersebut akan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Apabila masyarakat sudah mampu dan mandiri berarti masyarakat tidak lagi berada dalam lingkaran kemiskinan karena masyarakat miskin itu tidak memiliki daya untuk mengembangkan dirinya. Jika masyarakat sudah keluar dari lingkaran kemiskinan maka pemberdayaan tersebut berhasil dan membantu proses pembangunan terutama pembangunan dibidang ekonomi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Siak, PT. Permodalan Siak melakukan beberapa langkah, diantaranya :

1. Menumbuhkan

Menumbuhkan memiliki arti membangkitkan atau membangun. Yang dimaksudkan dengan membangkitkan dan membangun disini berawal dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Masyarakat miskin yang tidak memiliki apa-apa menjadi target penumbuhan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006. Dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin PT. Permodalan Siak menyediakan bantuan permodalan dengan bermacam-macam jenis kredit yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun jenis-jenis kredit yang disediakan PT. Permodalan Siak :

1. Kredit perorangan. Merupakan kredit untuk masyarakat Kabupaten Siak yang ditujukan untuk perseorangan yang memiliki usaha dan jaminan di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% pertahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun.
2. Kredit Badan Usaha. Merupakan kredit yang ditujukan untuk badan usaha yang memiliki badan hukum PT/CV di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% pertahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun.
3. Kredit Koperasi. Merupakan kredit yang ditunjukan untuk usaha dengan badan hukum koperasi yang berada di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% pertahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun.
4. Kredit LKM/ Kelompok. Merupakan kredit yang ditujukan untuk LKM/ kelompok yang memiliki badan hukum yang berada di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% pertahun dengan jangka kredit maksimal 3 tahun.
5. Kredit karya. Merupakan kredit yang ditujukan untuk pegawai negeri sipil (PNS) karyawan BUMD/ BUMN yang berada di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% pertahun dan jangka dan jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.
6. Kredit Candak Kulak. Merupakan kredit yang

ditujukan untuk kelompok usaha mikro yang ada di Kabupaten Siak, dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, dengan jasa kredit sebesar 2% perbulan dan jangka waktu kredit maksimal 6 bulan.

7. Kredit Masyarakat Miskin. Merupakan kredit yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif di Kabupaten Siak, dengan imbalan jasa kredit sebesar 8% pertahun dan jangka kredit maksimal 3 tahun.
8. Kredit Peralatan Pertanian. Merupakan kredit yang ditujukan kepada petani untuk membantu pengadaan peralatan pertanian dengan imbal jasa kredit sebesar 7% pertahun dan jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.
9. Kredit Karyawan PT. Permodalan Siak. Merupakan kredit yang khusus diberuntukan untuk karyawan PT. Permodalan Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 6% pertahun dan jangka waktu kredit maksimal 3 tahun untuk karyawan PKWT dan 5 tahun untuk karyawan tetap.
10. Kredit Sawit Rakyat. Merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Siak, dengan imbal jasa kredit sebesar 7% pertahun dan jangka waktu kredit maksimal 10 tahun.
11. Kredit modal kerja koperasi petani kebun kelapa sawit program Siak I dan Siak II.

Merupakan kredit yang ditujukan untuk koperasi yang berada dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit, dengan imbal jasa kredit sebesar 8% pertahun dan jangka waktu kredit maksimal 36 bulan.

Sasaran utama penumbuhan ekonomi dalam bentuk modal yang dilakukan oleh PT. PERSI yaitu memberdayakan masyarakat miskin dengan cara pemberian dana pinjaman untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sasaran utama pembangunan ekonomi adalah mengangkat taraf hidup masyarakat. Langkahnya dimulai dari bawah yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin sangat penting untuk meningkatkan perekonomian mereka sehingga kehidupan mereka dapat lebih baik lagi.

Masyarakat miskin yang tidak memiliki daya diberdayakan dengan bantuan modal untuk membuka usaha ekonomi sehingga mereka bisa membuka peluang-peluang baru untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan antara tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui pendirian PT. PERSI dengan kenyataan yang terjadi.

Dari hasil pengamatan dan analisa penulis, kredit yang disediakan oleh PT. PERSI tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin yang ingin mengembangkan perekonomian mereka. Target yang ingin dicapai dengan didirikannya PT. PERSI adalah memberdayakan ekonomi masyarakat

miskin sedangkan dalam pelaksanaannya masyarakat miskin tidak dapat melakukan peminjaman di PT. PERSI. Nasabah PT. PERSI banyak dari kalangan ekonomi menengah, masyarakat yang tergolong miskin tidak ada yang melakukan peminjaman.

2. Mengembangkan

Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna. Sedangkan mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan maju dan bertambah baik. Mengembangkan bisa dimulai dari sesuatu yang telah ada atau dari sesuatu yang belum ada. Pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan setelah tahap pertama dalam pemberdayaan dilaksanakan yaitu tahap menumbuhkan. Pada tahap menumbuhkan masyarakat diberi daya agar bisa memiliki kemampuan dan kemandirian, sedangkan pada tahap mengembangkan masyarakat diberi kemudahan-kemudahan setelah dibangun dan dibangkitkan dengan cara diberi daya agar mereka menjadi maju dan bertambah baik.

Proses mengembangkan yang dilaksanakan oleh PT. PERSI dalam upaya membantu agar masyarakat yang menjadi nasabahnya menjadi maju dan bertambah baik adalah dalam bentuk memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap nasabah. Maju atau berkembang dalam hal bertambah besarnya usaha yang mereka jalani. Bentuk lain dari maju dan berkembangnya nasabah adalah terjadi peningkatan pendapatan

masyarakat yang telah menjadi nasabah yang dulu kurang untuk memenuhi dalam kebutuhan pokok hidup kemudian naik menjadi berlebih. Pendapatan meningkat tidak lagi sebatas dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup namun bisa memenuhi keperluan sekunder lainnya.

Adapaun langkah-langkah mengembangkan usaha ekonomi yang dilakukan oleh PT. PERSI terhadap nasabahnya, antara lain :

a) Menaikkan Jumlah Plafond Pinjaman

Langkah pengembangan yang dilakukan oleh PT. PERSI adalah dengan memberikan peluang kepada nasabahnya untuk memperluas bidang usahanya dengan cara menaikkan plafond peminjaman. Dalam kebijakan yang dibuat oleh PT. PERSI, pada tahap awal peminjaman, nasabah hanya bisa meminjam modal maksimum Rp. 50.000.000 dengan jaminan atau tanggungan bernilai minimal Rp. 60.000.000. Selanjutnya jika pembayaran kredit lancar dan sampai lunas, apabila nasabah ingin melakukan peminjaman lagi maka besarnya plafond tidak dibatasi lagi. Plafond peminjaman yang awalnya hanya boleh Rp. 50.000.000 bisa menjadi Rp. 100.000.000 – Rp. 150.000.000.

b) Memperpanjang Jangka Tahun Pembayaran

Bentuk pengembangan lain yang dilakukan oleh PT. PERSI kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah memperpanjang jangka tahun pembayaran. Langkah memperpanjang jangka tahun pembayaran diberikan kepada nasabah yang mengalami penunggakan dan kesulitan dalam pembayaran cicilan

setiap bulan. Kebijakan ini diberikan kepada nasabah yang rencana penggunaan kreditnya untuk sektor perkebunan. Kesulitan pembayaran ini disebabkan oleh tidak stabilnya pendapatan nasabah tersebut. Pendapatan menurun karna dipengaruhi oleh turunnya harga jual karet atau sawit sedangkan harga kebutuhan pokok naik, ini menyebabkan nasabah kesulitan melakukan pembayaran kredit karena terjadinya pergolakan antara dua kebutuhan yang sama-sama harus segera dipenuhi.

Dengan menurunnya pendapatan tentu masyarakat yang menjadi nasabah lebih memilih untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidupnya dari pada membayar cicilan kredit setiap bulan. Dalam upaya membantu nasabahnya menghadapi penunggakan pembayaran kredit, PT. PERSI memberikan kemudahan dengan memperpanjang jangka tahun peminjaman agar nasabah tidak keberatan dalam membayar cicilan. Dengan ditambahnya perpanjangan jangka pembayarannya maka cicilan setiap bulan menjadi berkurang.

c) Menambahkan Modal

Langkah pengembangan terakhir yang dilakukan oleh PT. PERSI terhadap nasabahnya yaitu dengan menambahkan modal untuk jalannya usaha. Kebijakan ini diberikan kepada nasabah yang mengalami penunggakan dengan rencana penggunaan kreditnya untuk sektor perdagangan. Penunggakan terjadi akibat usaha yang mereka bangun tidak berkembang. Tidak Bergeraknya usaha ekonomi mereka disebabkan oleh manajemen dalam

perdagangan yang kurang baik sehingga berdampak pada kegiatan jual beli. Jika kegiatan jual beli tidak berjalan lancar tentu berdampak pada perputaran modal dan pendapatan nasabah. Ujung dari masalah ini adalah nasabah mengalami kesulitan dalam membayar cicilan setiap bulan karena usaha ekonomi mereka tidak berjalan.

3. Membina

Pembinaan adalah suatu tindakan, teguran-teguran, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dan suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan yang baik diperlukan adanya usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan dan pengendalian atau pengawasan.

Pembinaan dilakukan dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Pembinaan ini menyangkut langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pembinaan dilakukan melalui

memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan kebutuhan-kebutuhannya. Pembinaan yang dilakukan PT. PERSI terhadap nasabahnya berupa masukan terhadap usaha nasabahnya ketika staff turun kelapangan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Siak Tahun 2007-2012

1. Menumbuhkan

Pada tahap awal pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat muncul masalah. Kredit-kredit yang disediakan oleh PT. PERSI sebagai alat untuk menumbuhkan ekonomi rakyat tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat kalangan ekonomi rendah. Pemberdayaan ekonomi rakyat seharusnya dimulai dari dasar yaitu dari kalangan ekonomi bawah. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat miskin tidak dapat menjangkau kredit-kredit yang disediakan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang ingin meminjam modal ke PT. PERSI.

Salah satu syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh masyarakat adalah fotocopy jaminan atau tanggungan yaitu berupa surat tanah. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki daya. Masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, jangankan tanah untuk makan saja susah.

Kalaupun mereka memiliki tanah warisan tentu mereka harus mengurus surat-suratnya terlebih dahulu, tentunya butuh biaya untuk mengurus surat-surat tanah tersebut. Karena didaerah yang terpencil tanah tidak memiliki surat atau sertifikat kepemilikan.

Jika dilihat dari dalam PT. PERSI, dalam pencairan dana bantuan permodalan PT. PERSI harus kepada SOP pencairan kredit, kelengkapan sarat dan dokumen merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Salah satu sarat dan dokumen yang sulit dilengkapi oleh masyarakat miskin adalah photocopy jaminan atau tanggungan. Jaminan atau tanggungan perjanjian kredit merupakan hal penting dalam proses perguliran dana bantuan karna jaminan atau tanggungan kredit yang berupa surat tanah menjaga keseimbangan perputaran dana yang dimiliki oleh PT. PERSI.

2. Mengembangkan

Berkembangnya ekonomi masyarakat bisa dilaksanakan setelah masyarakat menjadi nasabah PT. PERSI, dengan menjadi nasabah baru perkembangan dapat dilaksanakan oleh PT. PERSI. Karena tahap awal sebelum pengembangan dilaksanakan adalah tahap menumbuhkan ekonomi. Alat utama dari menumbuhkan ekonomi masyarakat adalah beberapa jenis kredit yang telah disediakan. Jika hanya 3 jenis kredit saja yang jalan bagaimana pengembangan bisa optimal dilaksanakan. Pengembangan hanya tertuju pada wilayah yang kredit yang jalan sementara jenis kredit yang tidak jalan tidak dapat dilaksanakan pengembangan. Berdasarkan hasil

penelitian penulis tidak jalannya beberapa jenis kredit yang disediakan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi/ promosi dari PT. PERSI ke masyarakat.

Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, dimana beberapa dari Kecamatan letaknya sangat jauh dari ibu kota Kabupaten, bagaimana kehadiran dan fungsi PT. PERSI bisa diketahui masyarakat jika promosi yang dilakukan oleh PT. PERSI hanya mengikuti kegiatan dari pemda. Kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemda hanya dilaksanakan disepertaran ibukota Kabupaten dengan mengundang beberapa masyarakat yang dianggap penting dan terkait masalah yang dilaksanakan. Tidak seluruh lapisan masyarakat yang hadir dalam acara yang dilaksanakan oleh Pemda tersebut Sama halnya kegiatan pemda yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan itupun jarang dilaksanakan.

3. Membina

Pembinaan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu pembinaan merupakan langkah akhir untuk menjamin agar pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Namun dari masalah penyelewengan yang muncul maka nilai-nilai pemberdayaan masyarakat yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2006 rusak karena dana yang disalurkan disalahgunakan oleh nasabah. Pembinaan terdiri dari beberapa faktor diantaranya, pengawasan, pemantauan, dan

evaluasi. Masalah penyelewengan ini dinilai karena lemahnya pengawasan.

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua rencana pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga memiliki arti suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumberdaya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Sementara pembinaan atau pengawasan yang dilakukan oleh PT. PERSI kurang optimal, seperti yang terdapat pada wawancara sebelumnya. Pembinaan hanya dilakukan dengan kunjungan dengan memberikan masukan berupa saran pendapat dan kunjungan itupun tidak terjadwal.

Pengawasan dilakukan tidak terorganisir dan tidak terjadwal bahkan ada nasabah yang tidak dikunjungi setelah penyaluran dana. Lemahnya pengawasan inilah yang membuat nasabah mudah melakukan penyelewengan dana. Karena setelah dana dicairkan tidak ada pengecekan secara detail kemana saja dana tersebut digulirkan, asalkan angsuran kredit perbulannya lancar maka tidak ada masalah bagi pihak PT. PERSI.

Dilihat dari sudut sosial mungkin ini fungsi sosial dari hadirnya PT. PERSI ditengah-tengah

masyarakat. Membantu mempermudah dan meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan yang mendesak. Namun jika dilihat dari sudut dasar hukum didirikannya PT. PERSI Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 maka penyelewengan tersebut sudah jauh keluar dari nilai-nilai yang terkandung didalam Perda tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian dan hasil analisa yang penulis lakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tahap pertama pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PT. PERSI yaitu tahap menumbuhkan ekonomi masyarakat belum optimal terlaksanakan. Belum optimal terlaksananya penumbuhan ekonomi masyarakat disebabkan modal usaha yang disalurkan dengan cara sistem kredit, belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. PT. PERSI hanya membantu mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang telah ada bukan menumbuhkan ekonomi masyarakat yang belum memiliki apa-apa. Hal ini dapat dilihat dari jenis kredit yang disediakan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi rendah.
2. Pada tahap mengembangkan ekonomi masyarakat pengembangannya juga belum optimal terlaksana, karena hanya beberapa dari jenis kredit yang disediakan terjadi proses peminjaman. Hal ini disebabkan sosialisasi atau promosi tentang

perusahaan belum cukup maksimal. Sosialisai hanya dilakukan dengan cara ikut Pemda, apabila Pemda ada kegiatan ke masyarakat maka PT. PERSI ikut serta dalam acara tersebut untuk mensosialisasikan perusahaan mereka. Sulit untuk masyarakat yang berada di 14 Kecamatan untuk mengetahui keberadaan dan apa saja yang disediakan oleh PT. PERSI jika promosinya hanya mengandalkan sosialisasi yang mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Pemda. Tidak semua masyarakat yang ikut dalam pelatihan atau seminar yang dilaksanakan oleh pemda. Karena promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut.

3. Pembinaan yang dilaksanakan oleh PT. PERSI belum maksimal dilaksanakan. Pembinaan hanya dilakukan dengan kunjungan dengan memberikan masukan saran terhadap usaha yang dijalani nasabahnya. Masukan dan saran tersebut tidak terorganisir dengan baik bahkan ada beberapa nasabah tidak mendapat kunjungan dari PT. PERSI. Pengawasan dalam hal untuk membina ekonomi masyarakat masih lemah. Tidak ada pengecekan secara detail kemana saja dana yang didapat diarahkan. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan beberapa nasabah melakukan tindakan penyelewengan dana. Dana

digunakan untuk kegiatan konsumtif bukan untuk kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bambang, Suggono. 1994. *Hukum Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Euis, Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fisip Universitas Riau. 2007. *Pedoman Penulisan dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip*. Pekanbaru: TP2 Fisip dan Unri Press.
- Lexi J Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. S. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Riant, Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia.
2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2005. *Analisi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syahza, Almasdi. 2009. *Ekonomi Pembangunan, Teori dan kajian Empirik Pembangunan Pedesaan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- W. Gulo. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.

Skripsi :

- Istiqomah. 2013. *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2011*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.
- Jeffrey Halim Wardan. 2013. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pembangunan di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2011*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.
- R. Riki Kurniadi. 2013 *Pemberdayaan UKM Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan Pada PTPN V di Bukit Selasih Kabupaten Indragiri*

Hulu. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.

Tra Zuhanda Setiawan. 2011. *Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2009-2010*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau, Pekanbaru.

Peraturan Daerah :

Perda Kab. Siak No 11 Tahun 2006
*Tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Perseroan
Terbatas (PT) Permodalan
Siak.*